

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PINRANG**



BOSOWA

O L E H

SUHARIAH T

4586020197 / 871133235

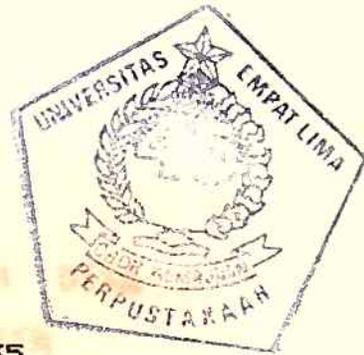
**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
menempuh ujian Sarjana Negara
Jurusan Administrasi Negara**

pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1991

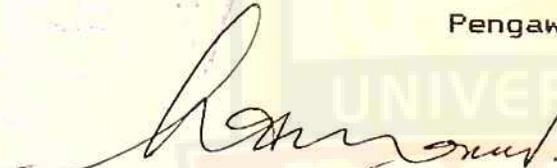
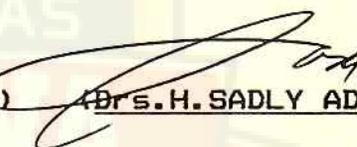
HALAMAN PENERIMAAN



Pada hari/tanggal : Senin, 22 Juli 1991
Skripsi atas nama : S U H A R I A H. T
Nomor Stb/NIRM : 45 86 020 197 / 87 113 3235

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"
Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna mem-
peroleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Administrasi
Negara.

Pengawas Umum

 (PROF. MR. DR. H. A. ZAINAL ABIDIN FARID, SH)  (Drs. H. SADLY AD, MPA)

Rektor Universitas "45"

Dekan Fisipol UNHAS

Panitia Ujian

 (PROF. DR. H. M. SYUKUR ABDULLAH)

 (Drs. GUNTUR KURNAENI)

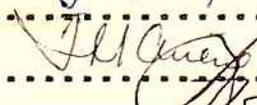
Ketua

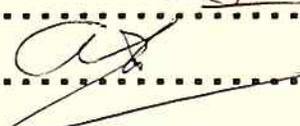
Sekretaris


(PROF. DR. H. M. SYUKUR ABDULLAH)

TIM PENGUJI

1. PROF. DR. H. M. SYUKUR ABDULLAH
2. Dra. H. HASYAH HANENG, MPA
3. Drs. H. MISBAHUDDIN, MS
4. Drs. H. ACHMAD SAHUR, MS


.....

.....

.....

.....

HALAMAN PENGESAHAN

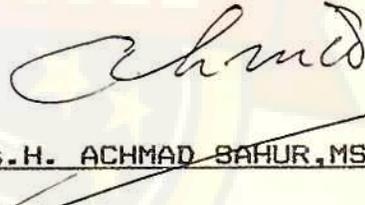
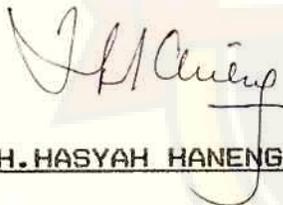
Judul Skripsi : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEM-
BANGUNAN DESA DI KECAMATAN WATANG
SAWITTO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PINRANG

Nama : S U H A R I A H . T
Nomor Stb/Nirm : 45 86 020 197 / 87 113 3235
Jurusan : Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



(Dra. H. HASYAH HANENG. MPA)

(Drs. H. ACHMAD SAHUR, MS)

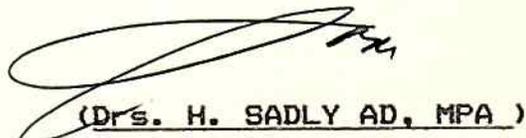
Mengetahui

Dekan Fakultas,

Ketua Jurusan,



(Drs. H. M. THALA)



(Drs. H. SADLY AD, MPA)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kehadiran Allah Swt, oleh karena Rahmat dan Karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai suatu persyaratan bagi setiap mahasiswa untuk mengikuti ujian kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".

Penulis dalam menyusun skripsi ini tidak jarang menemukan hambatan dan kesulitan dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan-kelemahannya. Namun berkat bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya.

Dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga utamanya kepada :

1. Ibu Dra.H.Hasyah Haneng MPA, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Achmad Sahur MA selaku Pembimbing II serta Bapak Drs. Rusdin Maidin selaku Pembimbing III, atas budi baik dengan kerelaan hati membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Rektor Universitas "45" dalam hal ini Bapak Prof.Mr.Dr.A.Zainal Abidin Farid.
3. Bapak Drs.H.M.Thala Dekan beserta Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".

4. Bapak Drs.H.Sadly AD MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".
5. Seluruh Dosen/Asisten Dosen dan Staf Tata Usaha yang ikut membantu penulis selama penelitian sampai penyelesaian studi penulis.
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan dorongan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, sembah sujud yang tercinta kepada ayahanda H.Tara dan Ibunda H.Hanafiah serta tante Ny.H.Rohani Musa Gani dan kakak-kakakku yang telah memberikan dorongan dan pengorbanan yang tidak ternilai baik berupa moril maupun materil sejak awal studi sampai akhirnya penulis mencapai tujuan yang diidam-idamkan bersama, di dalam menuntut Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

Semoga Allah Swt memberikan imbalan atau pahala yang berlipat ganda kepada kita semua, utamanya yang telah berbuat baik, baik di dunia maupun di akhirat kelak serta berkenan memberikan kesehatan dan kekuatan serta petunjuk-Nya.

A m i i n.

Ujung Pandang, Juli 1991

P e n u l i s,

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	x
B A B I : P E N D A H U L U A N	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...	4
D. Metode Penelitian	4
E. Sistematika Pembahasan	6
B A B II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Partisipasi	8
B. Tujuan Partisipasi	14
C. Pembangunan	21
B A B III : GAMBARAN UMUM KECAMATAN WATANG SAWITTO	
A. Keadaan Geografisnya	29
B. Keadaan Demografisnya	32
B A B IV : ANALISA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA	50
A. Bentuk/Macam Partisipasi	50
B. Tanggapan Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat Da- lam Pembangunan	62
C. Hambatan-hambatan dan Cara Pemeca- hannya	72

B A B	V : P E N U T U P	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran - saran	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN		82
L A M P I R A N		



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Kecamatan Sawitto diperinci menurut luas jumlah lingkungan, ORW dan ORT tahun 1990	30
2. Penggunaan tanah untuk persawahan di Kecamatan Watang Sawitto	31
3. Penggunaan tanah kering di Kecamatan Watang Sawitto	32
4. Jumlah penduduk dan rumah tangga diperinci menurut jenis kelamin di Kec. Watang Sawitto	34
5. Komposisi penduduk mata pencaharian	37
6. Jumlah dan jenis sekolah yang ada	41
7. Jumlah pemeluk agama/aliran kepercayaan di Kecamatan Watang Sawitto	43
8. Kelembagaan perekonomian Kecamatan Watang Sawitto	45
9. Jumlah produksi pertanian/perkebunan	46
10. Bentuk/macam partisipasi masyarakat yang menonjol dalam pembangunan	52
11. Hasil-hasil partisipasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan angket dan kelompok responden	54
12. Perbandingan dana subsidi pemerintah dan swadaya masyarakat di Kelurahan Sawitto	56

13. Perbandingan dan subsidi pemerintah dan swadaya masyarakat di Kelurahan Tiroang	57
14. Perbandingan dana subsidi pemerintah dan swadaya masyarakat di Kelurahan Mattiro Deceng..	58
15. Tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan	63
16. Tanggapan responden tentang animo masyarakat dalam partisipasi dalam pembangunan	65
17. Tanggapan responden tentang keikutsertaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan..	67



A B S T R A K S I

Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pedesaan/kelurahan dan bentuk/macam partisipasi yang dilaksanakan masyarakat dalam pembangunan pedesaan/kelurahan serta bagaimana tanggapan masyarakat dalam pembangunan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keikutsertaannya masyarakat secara aktif dalam pembangunan dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Di samping itu penelitian diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat khususnya di Kecamatan Watang Sawitto Daerah Tingkat II Pinrang untuk lebih memantapkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat khususnya di tiga Kelurahan : yaitu Kelurahan Sawitto, Tiroang dan Mattiro Deceng Wilayah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dalam pembangunan cukup tinggi namun dibalik itu masih ada sebahagian kecil masyarakat yang belum menyadari tentang pentingnya partisipasi tersebut.

Bentuk/macam partisipasi masyarakat yang paling menonjol dalam pembangunan adalah berupa tenaga, pikiran, uang dan barang/bahan.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Untuk terlaksananya pembangunan secara tertib, lancar dan berdaya guna diperlukan adanya partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan negara yang kuat yang tangguh seperti yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang berbunyi sebagai berikut :

"Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggaraan negara serta seluruh rakyat Indonesia". (GBHN, 1983).

Hal tersebut cukup mengandung makna yang mendalam karena sekaligus berkaitan dengan berhasilnya pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan dan ditumbuhkan untuk meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan pembangunan dan sekaligus agar hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah berupa swadaya dan gotong-royong masyarakat. Gotong-royong merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia, inti pembangunan.

Gotong-royong dalam hal ini dirumuskan sebagai suatu kegiatan kerja sama sejumlah besar warga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan umum (masyarakat).

Pada tingkat perkembangan tertentu dari pembangunan, partisipasi warga dan masyarakat sangat diharapkan. Hal ini lebih menjamin keselarasan dan kelanjutan pembangunan dibanding apabila dipakai cara mobilisasi atau dengan paksaan. Demikian pula apabila hanya menekan pada sektor ekonomi saja sering kita lihat sengketa-sengketa yang cukup serius dan ini terjadi pada saat masyarakat tersebut memasuki tingkat tertentu dari perkembangannya. Pihak berkuasa terlalu biasa memakai metode pemaksaan dalam menjalankan kehendaknya, kurang tepat menyesuaikan diri terhadap tuntutan yang datang dari masyarakat.

Persoalan sekarang adalah masalah implementasinya yaitu ada suatu atau tidak adanya partisipasi masyarakat secara sukarela dan bergairah dalam pembangunan dan bagaimana menggairahkan masyarakat supaya bergairah dalam pembangunan pedesaan.

Demikian halnya masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dalam partisipasinya masih dihadapkan pada beberapa persoalan antara lain : masih perlunya ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah setempat, rendahnya tingkat pendidikan serta tingkat ekonomi masyarakat, dan sebagainya sehingga masih enggan menerima secara langsung ide-ide yang dibawa oleh pemerintah tersebut ketengah-tengah masyarakat.

Kenyataan ini terlihat dengan adanya berbagai kegiatan pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang pada khususnya, dimana kurang nampak/nyata keikutsertaan masyarakat di daerah tersebut.

Untuk maksud di atas, maka segala potensi pemerintah yang ada dan tumbuh di dalamnya mempunyai fungsi antara lain sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa di daerah tersebut. Karena dapat digunakan sebagai motivator di dalam kerangka pembangunan desa yang sedang dan akan dilaksanakan dimasa datang.

Dengan demikian, maka persoalan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Watang Sawitto perlu dianalisa.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan pembahasan di atas, maka rumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sejauh manakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan ?
2. Bagaimana bentuk/macam partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan di Kecamatan Watang Sawitto ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat dan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.
- b. Untuk mendapatkan gambaran dan informasi mengenai tingkat partisipasi masyarakat pedesaan yang ada di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.
- c. Untuk mengetahui hasil-hasil yang sudah dicapai dan yang dibiayai serta diprakarsai oleh masyarakat seluruhnya.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kegunaan penelitian dapat diharapkan sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah mengenai kesadaran masyarakat dalam pembangunan pedesaan.
- b. Dapat bermanfaat sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan pembangunan terutama dipedesaan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian diskriptif dengan menggunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research):

penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan dengan membaca literatur atau bacaan-bacaan yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research): data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Interview; dengan beberapa orang pemuka-pemuka masyarakat dan aparat pemerintah yang mengetahui tentang hal-hal yang menyangkut partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

b. Observasi; pengamatan tentang fenomena-fenomena yang terjadi dari pelaksanaan partisipasi masyarakat yang dilakukan di beberapa desa di daerah Kabupaten Pinrang.

Daerah penelitian adalah Kecamatan Sawitto dan yang dijadikan sebagai daerah pengumpulan data adalah tiga kelurahan yang ditetapkan berdasarkan kriteria status perkembangan kelurahan. Ketiga kelurahan yang dimaksud adalah Kelurahan Tiroang tingkat swadaya, Kelurahan Mattiro Deceng tingkat swadaya, Kelurahan Sawitto tingkat swasembada.

Jumlah responden yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 50 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kantor Bangdes : 5 orang (Kepala + wakil + 3 org staffnya).
2. Desa/Kelurahan : 3 orang (satu - org setiap desa)
3. Dalam organisasi masyarakat desa :
 - L K M D : 5 orang setiap desa
 - Pemuka masyarakat : 3 orang setiap desa
 - K U D : 5 orang setiap desa
 - P K K : 5 orang setiap desa
 - Kelompok Tani : 3 orang setiap desa
 - Pengusaha : 3 orang setiap desa
 - Kepala Keluarga yang terdiri:
 - Buruh tani : 3 orang setiap desa
 - Pedagang : 3 orang setiap desa
 - Tukang Kayu : 2 orang setiap desa

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pengumpulan data skunder dikategorikan menurut keperluan, pengumpulan data primer diperoleh menurut serangkaian wawancara.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, secara garis besarnya

disusun secara sistematis pada komposisi bab ini, untuk memudahkan isi skripsi secara keseluruhan yaitu:

Bab I : Pendahuluan, yang memuat hal yang berhubungan dengan Latar belakang masalah, prumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab ini penulis akan kemukakan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Pengertian partisipasi tujuan partisipasi dan pembangunan.

Bab III : Pada bab ini penulis akan kemukakan Gambaran Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang yang terdiri dari Keadaan Geografisnya dan Keadaan demografisnya.

Bab IV : Pada bab ini penulis akan kemukakan Analisa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang terdiri dari bentuk/macam partisipasi, tanggapan masyarakat dan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan hambatan-hambatan dan cara pemecahannya.

Bab V : Pada bab ini merupakan bab penutup dari seluruh pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Partisipasi

Istilah partisipasi sebenarnya diambil dari istilah asing "Participation" yang artinya mengikutsertakan orang lain.

Oleh Bintoro Tjokroamidjojo disebutkan bahwa :

"Partisipasi masyarakat suatu kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan atas dasar kesukarelaan ia menjadi mobilisasi apabila terdapat kekuatan ekstern yang menggerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu (mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri), atau pekerjaan secara gotong royong". (Bintoro, 1978:225).

Demikian juga pendapat Dr.Mochtar Mas'ud bahwa: "Partisipasi terkandung sikap keaktifan pribadi, sedang dalam mobilisasi terkandung sikap keterpaksaan atau dorongan dari luar". (Dr.Mochtar Mas'ud, 1983:5).

Dalam hal ini, Drs. M.Said Saggaf mengemukakan:

"Masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu yang mempunyai perasaan tertentu dan perasaan bersatu, terikat oleh nilai-nilai sekelompok sosialnya yang mempunyai kesadaran bahwa hanya dengan hidup demikian kebutuhan akan kepentingan-kepentingan yang pokok dapat dipenuhi". (M.Said Saggaf, 1975:3).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, A.Gani Baso menyebutkan ciri-ciri dari suatu masyarakat adalah sebagai berikut:

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Partisipasi

Istilah partisipasi sebenarnya diambil dari istilah asing "Participation" yang artinya mengikut sertakan orang lain.

Oleh Bintoro Tjokroamidjojo disebutkan bahwa :

"Partisipasi masyarakat suatu kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan atas dasar kesukarelaan ia menjadi mobilisasi apabila terdapat kekuatan ekstern yang menggerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu (mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri), atau pekerjaan secara gotong royong". (Bintoro, 1978:225).

Demikian juga pendapat Dr.Mochtar Mas'ud bahwa: "Partisipasi terkandung sikap keaktifan pribadi, sedang dalam mobilisasi terkandung sikap keterpaksaan atau dorongan dari luar". (Dr.Mochtar Mas'ud, 1983:5).

Dalam hal ini, Drs. M.Said Saggaf mengemukakan:

"Masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu yang mempunyai perasaan tertentu dan perasaan bersatu, terikat oleh nilai-nilai sekelompok sosialnya yang mempunyai kesadaran bahwa hanya dengan hidup demikian kebutuhan akan kepentingan-kepentingan yang pokok dapat dipenuhi". (M.Said Saggaf, 1975:3).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, A.Gani Baso menyebutkan ciri-ciri dari suatu masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai sejumlah manusia
2. Mempunyai tempat tertentu
3. Mempunyai tatacara sosial pelayanan lembaga yang sama
4. Mempunyai warisan sosial yang sama
5. Mempunyai rasa kesatuan
6. Dapat memecahkan problema yang sama berdasarkan rasa kesatuan. (Drs.A.Gani Baso, 1975:2).

Menurut J.B.A.P Polak bahwa masyarakat adalah wadah dari segenap antara hubungan sosial terdiri dari sub-sub kelompok. (J.B.A.P Polak, 1982 : 72).

Partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong, diselenggarakan atas dasar "kesukarelaan" sebagai manifestasi swadaya masyarakat. Berikut Said Saggaf, mengemukakan bahwa :

"Swadaya adalah kemampuan daeri suatu kelompok (masyarakat) dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah penentuan kebutuhan-kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok (masyarakat)". (Drs. Said Saggaf, 1975 : 4).

Oleh Zainal Wali Amrullah, dikemukakan bahwa pengertian partisipasi masyarakat adalah: "Swadaya dan gotong royong masyarakat dibina dan dikembangkan dengan melalui perubahan sikap mental masyarakat adalah rasa kesadaran tanggung jawab dan kemampuan dalam pembangunan".

Partisipasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah menyangkut partisipasi dengan kesadaran tinggi spontan dan semangat yang besar. Dengan demikian partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan

masyarakat dalam pembangunan.

Keterlibatan aktif masyarakat diartikan sebagai:

- "1. Keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategis dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini berlangsung dalam proses politik dan proses sosial hubungannya antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.
2. Keterlibatan dalam memikul beban tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan atau produktif yang serasi pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain.
3. Keterlibatan dalam memetik hasil-hasil dan manfaat pembangunan secara keadilan". (Bintoro, 1977 : 205).

Setiap orang yang tergabung dalam masyarakat mempunyai perasaan bersatu untuk saling tolong menolong, terikat pada nilai-nilai sosialnya yang memenuhi kebutuhan dan kegiatannya.

Nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat Indonesia asli yaitu jiwa sosial atau semangat "gotong royong" dan sistem "musyawarah dan mufakat".

Gotong royong memenuhi dua fungsi, yang bersifat jaminan sosial dan yang lain bersifat pekerjaan umum.

Di dalam fungsinya sebagai sosial gotong royong dalam bentuk tolong menolong, sifatnya sukarela dalam keadaan kematian, perkawinan, pembuatan rumah dan

lain-lain. Masing-masing peserta memberikan bantuan berupa tenaga beserta barang. Adapun fungsinya yang terakhir ini gotong royong telah disalah gunakan pada zaman feodal, kolonial dan pendudukan Jepang. Akibatnya ialah bahwa gotong royong ini berubah menjadi rodi.

Berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, adalah suatu hal yang penting dibicarakan, karena apabila masyarakat dibina dan diarahkan sebagai tenaga kerja pendukung yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengandung makna akan adanya kegiatan yang dilaksanakan melalui pengintegrasian dan koordinasi serta pembangunan swadaya dan gotong royong dalam masyarakat melalui organisasi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam hubungan ini, sesuai penjelasan Dinas Sosial DKI tahun 1979 dimana dikemukakan bahwa :

"Partisipasi adalah azas kekeluargaan dan semangat gotong royong yang dijadikan salah satu modal yang sangat penting oleh bangsa Indonesia dalam rangka memasyarakatkan kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan nasional". (Dinas DKI, 1979 : 7).

Berdasarkan pendapat di atas, maka partisipasi masyarakat bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menunjang dan meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan diseluruh bidang secara terpadu agar tercapai tujuan nasional.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terutama masyarakat desa, pada hakekatnya menyangkut 2 (dua) type yang pada prinsipnya berbeda yaitu :

- "1. Partisipasi dalam aktifitas-aktifitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus.
2. Partisipasi sebagai individu diluar aktifitas-aktifitas bersama dalam pembangunan". (Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan 1981 : 69).

Dalam type partisipasi yang pertama, masyarakat harus diajak, dipersuasi dan diperintahkan oleh wakil-wakil dari suatu instansi, lembaga dan Departemen atau oleh kepala desa, untuk berpartisipasi dan menyumbangkan tenaga atau hartanya kepada proyek-proyek pembangunan yang biasanya bersifat fisik. Sedangkan dalam tipe partisipasi yang kedua, tidak ada proyek aktivitas seperti proyek yang bersifat, tetapi ada proyek pembangunan dan tidak memerlukan suatu partisipasi masyarakat atas perintah/paksaan atasannya, tetapi selalu atas kemauan mereka sendiri.

Menyimak pendapat tersebut di atas, maka masyarakat perlu difungsikan dalam pembangunan usaha

untuk menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program-program pembangunan agar mencapai tujuan nasional.

Dalam hubungan dengan konsep tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang pada khususnya menjadi sasaran pokok adalah :

1. Bagaimana cara menggugah/menimbulkan minat dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
2. Faktor apa yang harus diperhatikan/berpengaruh untuk menggerakkan partisipasi masyarakat.

Dalam hal ini perlu dirobah pengetahuan dan sikap masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi mereka dalam pembangunan, sehingga masyarakat tersebut sadar dan mengerti tujuan serta fungsinya dalam pembangunan desa. Untuk itu gairah untuk melakukan pendekatan yang bersifat pribadi perlu diwujudkan dan dimantapkan oleh pemerintah setempat.

Pemerintah harus mengajak, mempersuasi dan menginstruksikan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan dimasa datang. Oleh sebab itu pemerintah hendaknya menyusun suatu sistem dan cara untuk pendekatan kepada masyarakatnya, agar

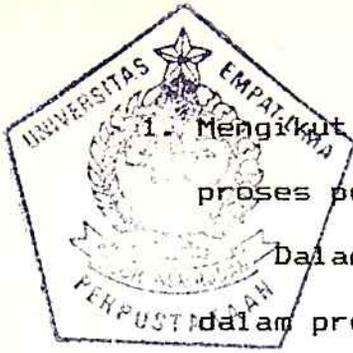
mereka dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan didaerahnya masing-masing, guna meningkatkan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan disegala bidang, maka secara otomatis pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pembangunan tersebut betul-betul dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata.

B. Tujuan Partisipasi

Oleh karena partisipasi masyarakat adalah merupakan azas kekeluargaan dan semangat gotong royong yang dijadikan salah satu modal yang sangat penting oleh bangsa Indonesia. Dalam rangka memasyarakatkan kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan nasional, maka partisipasi masyarakat bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menunjang dan meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan di segala bidang secara terpadu agar tercapai tujuan nasional.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di segala bidang maka dapat ditempuh jalan sebagai berikut :



1. Mengikut sertakan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan.

Dalam mengikut sertakan secara langsung bawahan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan

perencanaan, maka keputusan dan perencanaan yang kita buat kemungkinan akan menjadi baik, sebab kita akan mendapatkan bahan yang berguna dari mereka.

Selain itu karena merasa diikuti sertakan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan maka mereka akan merasa lebih bertanggung jawab sehingga dapat diharapkan pula semangat dan kegairahan kerja menjadi meningkat.

2. Menjelaskan tentang maksud dan tujuan keputusan dan perencanaan yang dikeluarkan.

Dalam praktek sangat sulit untuk mengikut sertakan semua pihak secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Pada hal kita menyadari sepenuhnya bahwa dalam pengambilan keputusan dan pembuatan perencanaan perlu adanya landasan partisipasi. Untuk itu maka harus dicari cara-cara lain agar keputusan dan perencanaan yang dibuat apabila dilihat dari sudut ekonomis maupun praktis masyarakat tidak dapat diikuti sertakan secara langsung, maka pimpinan harus berusaha untuk menjelaskan mereka maksud dan tujuan dari keputusan

dan perencanaan yang dibuatnya. Dengan demikian mereka itu akan merasa diikuti sertakan, sehingga dengan demikian partisipasi dapat ditimbulkan disini. Dengan jalan menjelaskan tentang maksud dan tujuan keputusan perencanaan tersebut, maka selain partisipasi dapat ditimbulkan, maka kemungkinan kesalah pahaman di dalam penafsiran keputusan dan perencanaan dapat pula diminimalkan.

3. Meminta saran dan tanggapan tentang keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan.

Bagi pihak tertentu dengan jalan menjelaskan maksud dan tujuan keputusan perencanaan yang dibuat akan dapat menimbulkan keputusan, sehingga partisipasi dapat diharapkan disini. Tapi pihak yang lain mungkin cara ini kurang dapat menimbulkan keputusan sehingga partisipasi kurang dapat diharapkan. Sebaliknya mengikut sertakan secara langsung dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, karena pertimbangan maupun praktis sulit dilaksanakan.

Untuk mengatasi itu maka pihak yang merasa kurang puas dengan penjelasan semata-mata, dapat dilakukan cara meminta tanggapan dan sarannya tentang keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan. Karena merasa diikuti sertakan/partisipasi maka kemungkinan tanggapan tingkatkan sehingga perenca-

naan yang akan dikeluarkan akan dapat lebih sempurna.

4. Meminta informasi tentang segala sesuatu dari mereka dalam usaha mengambil keputusan dan membuat perencanaan.

Untuk mencari cara lain yang dapat menimbulkan partisipasi dapat mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Cara tersebut antara lain dengan jalan meminta informasi kepada mereka tentang segala sesuatu dalam rangka pengambilan keputusan dan pembuatan perencanaan. Dengan cara ini selain demikian selain partisipasi dapat ditingkatkan, mungkin akan juga mendapatkan informasi yang sangat berharga.

Pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu ada dua tipe. Dalam tipe partisipasi yang pertama, rakyat pedesaan diajak, dipersuasi, diperintahkan atau dipaksa oleh wakil-wakil dari berbagai departemen atau pamong desa, untuk berpartisipasi dan menyumbangkan tenaga atau hartanya kepada proyek-proyek pembangunan yang khusus yang biasanya bersifat fisik.

Dalam tipe partisipasi yang kedua tidak ada proyek pembangunan, biasanya yang tidak bersifat

fisik dan tidak memerlukan partisipasi dari rakyat atau pemerintah atau paksaan dari atasannya, tetapi atas dasar kemauan mereka sendiri, contohnya partisipasi dalam Bimas menjadi akseptor keluarga berencana, menabung di Tabanas dan sebagainya.

Yang ditekankan dalam penelitian ini ialah partisipasi tipe pertama, yang berjiwa atau bersemangat gotong royong.

Selanjutnya dikatakan kalau apa yang dimaksud dengan gotong royong itu adalah sistem kerja bakti, mungkin malahan bisa menunjang pembangunan. Hanya saja asalnya, adalah bahwa sistem itu tak sesuai lagi dengan etik zaman sekarang karena pembangunan dengan mengeksploitasi tenaga murah rakyat menjadi berbau feodal dan kolonial. Lain halnya kalau rakyat mengerjakan suatu proyek berdasarkan gotong royong itu bermanfaat bagi mereka, barulah mereka akan mengadakan kerja bakti dengan sungguh-sungguh dan bukan kerja rodi.

Drs. Manannawawi mengemukakan bahwa partisipasi dalam swadaya gotong royong dapat berupa tenaga, bahan, uang dan skill/pikiran dan sebagainya. (Program Pembangunan Masyarakat Pedesaan, 1975:4).

Kesimpulan gotong royong harus menjadi manifestasi dari swadaya masyarakat, yakni dengan kesadaran dan inisiatif sendiri dengan kata lain

kesukarelaan dari masyarakat bukan gotong royong dan semangat kerja rodi atau mobilisasi dalam pembangunan.

Di atas telah kita bicarakan partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, maka selanjutnya adalah partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan yang biasa disebut pengawasan informil atau kontrol sosial. Pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, melalui surat kabar, majalah.

Memang dalam alam demokrasi masyarakat harus diberi kesempatan untuk turut mengawasi.

Pelaksanaan dari pengawasan bertujuan untuk :

- a. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana.
- b. Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya.
- c. Dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.

Untuk menggerakkan dan menggairahkan masyarakat dalam pembangunan ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut.

Drs. Djainuddin Sawe berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan ada berbagai cara didalam menggerakkan masyarakat. Ditinjau dari segi kejiwaan ada tiga metode yang sering dilakukan didalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, yakni :

- "1. Metode by force - kekuasaan
Metode ini didasarkan atas unsur paksaan, tidak memperhatikan situasi pada masyarakat, segala rencana yang bersumber dari atas harus dijalankan.
2. Metode by stimulation - menopang.
Di Indonesia, metode stimulasi kepada masyarakat desa telah dilembagakan, antara lain dalam Inpres Bangdes, lomba desa dan sebagainya.
3. Metode by persuasion - membujuk
Usaha ini, dilakukan dengan membujuk masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memperlihatkan suatu gambaran tentang kehidupan bergotong royong, misalnya melalui film, sandiwara dan sebagainya."
(Djainuddin Sawe, 1980 : 15).

Selanjutnya dikatakan yang dimaksud dengan pemimpin formal adalah mereka yang mendasarkan kepemimpinan pada jabatan formal seperti Lurah. Sedangkan pemimpin informal maka kepemimpinannya didasarkan pada kepercayaan yang diterima dari orang-orang disekelilingnya.

Tentu saja bisa terjadi pemimpin formal juga merupakan pemimpin informal. Pemimpin ini mempunyai legalitas dan sekaligus legitimasi pada dirinya.

Dengan perencanaan dalam masyarakat sekarang, terutama didesa-desa diharapkan terjadi perubahan-perubahan nilai-nilai kemasyarakatan; sebagai akibat teknologi penggunaan teknologi modern yang dapat melipat gandakan hasil-hasil sawahnya, maka kepercayaan makin diberikan kepada orang yang mempunyai pengetahuan modern.

C. Pembangunan

Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan menegaskan pengertian pembangunan sebagai berikut :

"... Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa".
(SP. Siagian, 1980 : 2).

Apabila definisi tersebut di atas dianalisa lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan apabila seseorang berbicara tentang pembangunan, yaitu :

- a. Bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang berarti suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri. Pentahapan tersebut dapat dibuat berdasarkan jangka

waktu, biaya atau hasil tertentu yang akan diperoleh.

- b. Bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental dimasyarakat, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan pembangunan.
- c. Bahwa pembangunan dilakukan secara berencana, dan perencanaan tersebut berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
- d. Bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas, maksudnya sebagai suatu cara hidup yang baru lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Seperti kita ketahui bahwa salah satu ciri dari masyarakat yang telah mencapai tingkat modernitas yang tinggi ialah bahwa masyarakat tersebut semakin dapat melepaskan diri dari tekanan dan kekangan alam dan bahkan menguasai alam sekelilingnya.
- e. Bahwa modernitas yang mencapai melalui pembangunan itu bersifat multi-dimensional. Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan itu mencakup seluruh aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan

dan keamanan nasional dan administrasi.

- f. Bahwa kesemua hal yang telah dikemukakan di atas ditunjukkan kepada usaha membina bangsa yang terus menerus harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Teori dan Strategi Pembangunan Nasional menyatakan antara lain :

"Pembangunan adalah suatu proses dinamis, pembangunan adalah suatu usaha kearah tingkat kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik. Pembangunan merupakan proses tanpa akhir suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan idea dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah".
(Bintoro Tjokroamidjojo, 1979 : 9).

Melalui pernyataan Bintoro tersebut di atas dapat dipetik makna dari pengertian pembangunan yakni:

1. Pembangunan merupakan suatu proses dinamis

Sebagai suatu proses dinamis mengandung pengertian bahwa pembangunan senantiasa berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan yang telah dicapai dan dinamika masyarakat. Dengan pengertian dinamis berarti kegiatan dalam pembangunan menghendaki adanya perubahan-perubahan menuju pada kondisi yang lebih baik dari kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Kedinamisan sebagai ciri

pembangunan adalah kegiatan dengan mengadakan perubahan, pertumbuhan dan upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air.

2. Upaya peningkatan kesejahteraan dan keadilan

Dapat dikatakan bukan usaha pembangunan kalau tidak dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Dalam pengertian kesejahteraan ini tidak terbatas pada kesejahteraan lahiriah saja tetapi juga termasuk kesejahteraan rohaniah. Pembangunan justru berupaya untuk menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan bathiniah.

Peningkatan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dilihat dari sudut pembangunan mengandung makna bahwa pembangunan itu bertujuan bukan hanya untuk satu golongan dan satu daerah saja tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia diseluruh wilayah tanah air.

3. Pembangunan merupakan proses tanpa akhir

Karena pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan keadilan, sedangkan tingkat kesejahteraan senantiasa relatif dalam arti kebutuhan manusia senantiasa meningkat pula, maka pembangunan akan tepat dilaksanakan sepanjang manusia dan masyarakat masih menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan.

Berhubung peningkatan kesejateraan dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam suatu tahap pembangunan saja, tapi harus dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Tercapainya satu tahapan pembangunan jangka panjang maka ditetapkan kembali program pembangunan jangka panjang berikutnya, sehingga secara keseluruhan merupakan suatu rangkaian tanpa akhir.

4. Pembangunan merupakan suatu perjuangan

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh rakyat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Dalam proses kegiatan tersebut dibutuhkan dana dan daya yang besar. Dana dapat diperoleh apabila rakyat dan pemerintah berupaya mencarinya, tenaga dan pengorbanan.

Kekayaan akan Indonesia dengan berbagai sumber harus diolah dahulu menjadi sumber-sumber riil bagi pembangunan. Merubah potensi ekonomi tersebut merupakan suatu perjuangan. Kalau dahulu bangsa Indonesia berjuang untuk merebut kemerdekaan merupakan syarat mutlak bagi pelaksanaan

pembangunan mengisi kemerdekaan.

Pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa segi dilihat dari segi kurun waktu pelaksanaannya. Ada yang disebut pembangunan jangka pendek yaitu pembangunan yang dilaksanakan dengan waktu satu tahun, pembangunan jangka menengah adalah pelaksanaan program-program dengan jangka waktu lima tahun yang lebih dikenal dengan istilah PELITA, dan program jangka panjang dengan mempergunakan jarak waktu lima atau enam kali PELITA atau 25 sampai dengan 30 tahun.

Menurut Drs. M. Said Saggaf :

"Pembangunan adalah konsepsi yang dinamis yang menunjukkan kepada suatu proses yang bergerak dari keadaan yang lebih dengan pengertian di dalamnya bahwa itu lebih baik, lebih maju, lebih tinggi dari pada keadaan atau tingkat sebelumnya".

(Drs. M. Said Saggaf, 1975 : 3).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka pembangunan itu adalah merupakan suatu proses atau usaha perubahan sosial (Social change) dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keadaan dari kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik (lebih diinginkan).

Dalam rangka perkembangan perubahan-perubahan kearah keadaan yang dianggap lebih baik yaitu pembangunan diperkembangkan suatu pendekatan, suatu pendekatan yang integral, karena perhatikan

terhadap pembangunan ekonomi saja diakui tidak memberikan jaminan untuk suatu proses pembangunan nasional yang stabil dan kontinu. Apabila diabaikan bidang sosial, maka sebagai suatu sistem perubahan ekonomi sukar berjalan dengan serasi dan bergerak kepada tujuan ekonomi itu sendiri kalau tidak diimbangi oleh keseluruhan perubahan di dalam masyarakat yang merupakan persyaratan bagi perubahan ekonomi.

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh itu dapat dikembangkan secara sadar oleh pemerintah yang sebaiknya pula mewakili kekuatan-kekuatan pembaharuan di dalam masyarakat. Tetapi pada akhirnya supaya perubahan itu mempunyai kemampuan berkembang yang dinamis perlulah proses tersebut didukung oleh kekuatan-kekuatan untuk pembaharuan dan pembangunan yang timbul dan bergerak di dalam masyarakat bangsa itu sendiri.

Dinamika pembangunan itu bukan saja dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi sebaiknya didukung oleh partisipasi masyarakat.

Di samping itu kemerdekaan suatu bangsa sering kali menuntut suatu kesamaan dan demokratisasi yaitu kesamaan untuk berpartisipasi dan melimpahkan

kepercayaan kepada diri masyarakat sendiri untuk mengambil prakarsa atau inisiatif pembangunan yang menyangkut kepentingan dirinya. Dasar pikiran ini terungkap dalam semboyan "Tidak akan berubah nasib suatu kaum bila kaum itu sendiri tidak berprakarsa mengubah nasibnya". Pembangunan dari bawah musti digalang sehingga sejalan dengan semangat demokrasi (dari masyarakat untuk masyarakat).

Dari pembahasan tersebut di atas maka dapatlah dimengerti bahwa untuk memperkembangkan perubahan ke arah keadaan yang lebih baik (pembangunan), diperlukan pendekatan yang unified (integral), seimbang antara pembangunan ekonomi dan non ekonomi, yaitu pembangunan yang didukung oleh kekuatan-kekuatan dari masyarakat yang didasarkan oleh atau atas prakarsa atau inisiatif sendiri.

B A B III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN WATANG SAWITTO

A. Keadaan Geografisnya

Untuk memberikan gambaran tentang potensi wilayah Kecamatan Watang Sawitto dalam rangka pembangunan, maka dalam bagian ini akan dikemukakan beberapa hal yang dianggap perlu mendapat perhatian termasuk faktor geografi. Oleh karena itulah maka bab ini akan kami ketengahkan beberapa aspek geografi Kecamatan Watang Sawitto sebagai salah satu Kecamatan dari delapan Kecamatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

Wilayah Kecamatan Watang Sawitto, terletak di bagian tengah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang. Apabila kita berangkat dari kota Pare-pare kearah Utara sejauh kurang 30 Km, maka kita akan tiba di Kota Pinrang yang berkedudukan dalam wilayah Kecamatan Sawitto merupakan ibu kota Kabupaten Pinrang.

Dari letak geografisnya, maka Kecamatan Watang Sawitto berada diantara kurang lebih $4^{\circ} 10' 30''$ sampai $3^{\circ} 19' 13''$ Lintang Selatan dan Bujur Timur $119^{\circ} 26' 44''$ sampai $119^{\circ} 47' 20''$.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Patampanua
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Barantani Kabupaten Sidrap

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Bulu,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Sompe.

Kecamatan Watang Sawitto memiliki luas kurang lebih 237 Km² yang terbagi dalam 8 (delapan) Kelurahan dan 38 lingkungan serta 100 ORW dan 250 ORT. Gambaran yang lebih terinci terlihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 1

Kecamatan Watang Sawitto Diperinci Menurut Luas dan Jumlah Lingkungan, ORW dan ORT Tahun 1990

No.	Kelurahan	Luas Km ²	Lingkungan	ORW	ORT
1.	Sawitto	5,86	5	18	45
2.	MacinnaE	14,56	5	15	39
3.	Temmasarange	34,86	5	15	42
4.	S a l o	30,65	4	10	23
5.	MatcorawaliE	37,45	7	14	28
6.	Mattiro Deceng	42,98	4	9	29
7.	Siparappe	31,00	3	6	10
8.	Tiroang	39,64	5	13	34
J u m l a h		237	38	100	250

Sumber Data : Kantor Kecamatan Watang Sawitto, 1991

Wilayah Kecamatan Watang Sawitto, secara keseluruhan merupakan hamparan dataran rendah, yang hampir separuh dari luas wilayahnya adalah hamparan persawahan dan

selebihnya merupakan dataran kering.

Apabila ditinjau dari penggunaan tanah menurut jenisnya di Kecamatan ini, ternyata bahwa dari luas 23.700 Ha. Tanah potensial telah dimanfaatkan untuk persawahan seluas 11.291 Ha atau sekitar 47,64 % dan 12.409 Ha, atau sekitar 52,36 % adalah tanah kering yang dimanfaatkan untuk lokasi bangunan, ladang, tegalan, perkebunan dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL 2
PENGUNAAN TANAH UNTUK PERSAWAHAN
DI KECAMATAN WATANG SAWITTO

No. !	Jenis Penggunaan	! Areal (Ha)	! %
1. !	Berpengairan	! 11,291	! 47,64
2. !	Berpengairan 1/2 Tehnis	! -	! -
3. !	Berpengairan sederhana	! -	! -
4. !	Tadah hujan	! -	! -
J u m l a h		! 11,291	! 47,64

Sumber Data : Kantor Kecamatan watang Sawitto, 1991

TABEL 3
 PENGGUNAAN TANAH KERING
 DI KECAMATAN WATANG SAWITTO

No.	Jenis Penggunaan	Areal (Ha)	Prosentase (%)
1.	Untuk bangunan dan halaman	7.485	31,59
2.	Tegal, kebun, ladang dan Huma	4.220	17,81
3.	Kolam, tebat, empang	28	0,12
4.	Untuk tanaman kayu-kayuan	250	1,05
5.	Yang sementara diusahakan/rawa	30	0,13
6.	Tanah lainnya	398	1,67
J u m l a h		12.409	52,36

Sumber Data : Kantor Kecamatan Watang Sawitto, 1991

B. Keadaan Demografis

Seperti halnya dengan faktor geografi yang telah diuraikan di atas, faktor lain yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan pembangunan adalah faktor demografi. Sehubungan dengan itu pada bagian ini perlu kiranya dike-

mukakan beberapa aspek demografi di Kecamatan Watang Sawitto.

1. Jumlah dan kepadatan penduduk

Telah kita ketahui bahwa pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Ini berarti bahwa untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya maka seluruh lapangan hidup dan kehidupan manusia Indonesia harus dibangun secara bersama-sama, sehingga dengan demikian setiap manusia Indonesia merupakan subjek sekaligus sebagai objek pembangunan.

Sebagai subjek pembangunan, maka setiap manusia Indonesia merupakan pelaksana pembangunan dan sebagai objek pembangunan, maka setiap manusia Indonesia harus merupakan sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan merata sesuai azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari hal tersebut di atas maka faktor penduduk merupakan potensi pembangunan yang sangat menentukan bagi kelancaran dan suksesnya pembangunan yang sangat menentukan bagi kelancaran dan suksesnya pembangunan dalam wilayahnya masing-masing. Penduduk tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan, sehingga usaha bersama dari seluruh rakyat yang dapat dirasakan sebagai usaha nyata dalam

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Karena pentingnya peranan penduduk suatu wilayah dalam kaitannya dengan pembangunan, dalam bagian ini perlu dikemukakan jumlah penduduk Kecamatan Watang Sawitto yang dapat dilihat dalam tabel berikut yakni jumlah penduduk yang diperinci menurut jenis kelamin dan rumah tangga.

TABEL 4
JUMLAH PENDUDUK DAN RUMAH TANGGA
DIPERINCI MENURUT JENIS KELAMIN
DI KECAMATAN WATANG SAWITTO

No.	Kelurahan	R. Tangga	Penduduk		
			LK	PR	Jumlah
1.	Sawitto	3.738	10.059	1.234	21.293
2.	S a l o	416	2.186	2.354	4.540
3.	MacinnaE	2.357	5.681	6.376	12.057
4.	Matcorawalie	2.124	5.361	6.160	11.521
5.	Temmasarange	1.659	4.442	5.057	9.499
6.	Mat. Deceng	1.317	3.779	3.991	7.770
7.	Tiroang	1.819	4.347	4.770	9.117
8.	Siparappe	409	1.022	1.082	2.104
J u m l a h		13.838	36.877	41.024	77.901

Sumber Data : Kantor Kecamatan Watang Sawitto, 1991

Selanjutnya apabila jumlah penduduk di Kecamatan

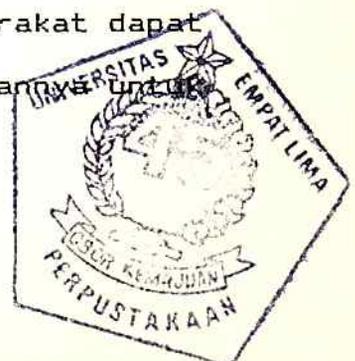
Watang Sawitto dikaitkan dengan luas wilayahnya, dapat pula diketahui kepadatan penduduknya yaitu kurang lebih 329 jiwa per Km². Ini berarti setiap satu kilometer didiami sebanyak kurang lebih 329 jiwa.

2. Mata pencaharian

Faktor mata pencaharian penduduk adalah salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dan sangat erat hubungannya dengan pembangunan. Pentingnya hal ini karena dari sini penduduk memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, khususnya fisik material.

Karena peranan mata pencaharian, maka faktor ini merupakan kebutuhan yang selalu dirasakan sangat mendesak. Hal ini dapat terlihat dari kenyataan yang ada dewasa ini dimana faktor lapangan kerja merupakan salah satu sasaran pembangunan; dengan kata lain bahwa dalam masa pembangunan dewasa ini pemerintah selalu berusaha membuka lapangan kerja, sehingga penduduk yang membutuhkan lapangan kerja dapat memperoleh pekerjaan yang layak sesuai Undang-undang Dasar 1945.

Pembangunan yang dilaksanakan memerlukan adanya partisipasi masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendapatannya yang diperoleh melalui lapangan kerja atau mata pencaharian. Hal ini sangat menentukan kelancaran dan suksesnya pembangunan, karena disamping masyarakat dapat memberikan materi yang bersumber dari pendapatannya



kepentingan pembangunan, juga penduduk yang melakukan kegiatan dalam menjalankan pekerjaannya sekaligus merupakan bentuk partisipasinya dalam pembangunan.

Dalam wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani lalu pedagang, pegawai negeri dan lain-lain.

Hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Watang Sawitto adalah wilayah yang sebagian besar merupakan hamparan tanah persawahan yang sangat subur bila dibandingkan dengan Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pinrang. Karenanya masyarakatnya lebih banyak yang menjadi petani (penggarap sawah).

Untuk jelasnya dalam tabel berikut ini akan kami ketengahkan komposisi penduduk menurut mata pencaharian di Kecamatan Watang Sawitto pada halaman berikut ini :

TABEL 5
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
DI KECAMATAN WATANG SAWITTO 1991

No.	Jenis Mata Pencaharian	Penduduk (jiwa)
1.	P e t a n i	13.765
2.	P e d a g a n g	6.904
3.	P e r t u k a n g a n	3.151
4.	Pegawai negeri sipil	2.636
5.	P e n g a n g k u t a n	938
6.	A B R I	485
7.	Buruh / Kuli	624
8.	Lain - lain	164
J u m l a h		28.667

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Pinrang, 1991

Berdasarkan data dalam tabel di atas, perlu dijelaskan bahwa penggolongan mata pencaharian berlaku tidak mutlak untuk beberapa golongan seperti petani, pedagang, pegawai negeri sipil dan sebagainya.

Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah petani yang juga bermata pencaharian sebagai pedagang atau sebaliknya. Hal tersebut sudah nampak sejak dahulu, dimana pada umumnya masyarakat Bugis dalam Kecamatan Watang Sawitto banyak yang berhasil dalam berdagang disamping bertani. Demikian pula dengan sebagian pegawai negeri yang selain

sebagai pegawai negeri juga adalah petani-petani tambak yang berhasil. Jadi pada dasarnya penggolongan pekerjaan atau mata pencaharian diatas tidak didasarkan pada spesialisasi pekerjaan melainkan kadang berfungsi ganda/rangkap.

3. Pendidikan

Faktor pendidikan adalah faktor yang tidak kalah pentingnya. Khusus bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dimana diamanatkan tugas pemerintah yang sekaligus merupakan tugas negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa inilah, maka pendidikan merupakan sarana atau wadah yang sangat menentukan. Dengan kata lain bahwa pendidikan merupakan upaya untuk mewujudkan aspirasi nasional seperti tersebut di atas.

Karena pentingnya pendidikan, maka faktor ini merupakan salah satu sektor yang senantiasa mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah bersama masyarakat. Besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan tersebut dengan jelas dapat diketahui dari berbagai kebijaksanaan pemerintah yang ditujukan kepada sektor ini dimana sejak Pelita Pertama sektor pendidikan merupakan salah satu sasaran pembangunan di bidang sosial budaya

yang secara terus menerus hingga dewasa ini, dan seterusnya akan dilanjutkan dalam Repelita selanjutnya.

Pembangunan sekolah-sekolah terus dilakukan sampai di daerah pedesaan dalam pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap anggota masyarakat. Pembangunan sekolah-sekolah tersebut, misalnya sekolah dasar nampak dengan jelas adanya kebijaksanaan pemerintah yang di dasarkan atas instruksi Presiden (Inpres).

Selain Instruksi Presiden untuk pembangunan sekolah dasar, juga masih terdapat Instruksi Presiden lainnya dalam rangka memajukan pendidikan, yaitu Instruksi Presiden dalam rangka pengangkatan tenaga-tenaga guru. Demikian pula penempatan serta pengangkatan bujang sekolah dan sebagainya termasuk alat-alat belajar pada tiap sekolah yang ada tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Selain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pendidikan, salah satu hal yang menuntut penyelenggaraan pendidikan secara terus menerus utamanya bagi bangsa Indonesia, yaitu pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Pelaksanaan pembangunan yang dimaksud harus dilaksanakan secara terus-menerus dan ditingkatkan, baik kegiatannya maupun hasil-hasilnya. Dengan demikian untuk menjamin kelancaran dan suksesnya pembangunan sampai di

daerah pedesaan diperlukan adanya tenaga-tenaga pembangunan yang semakin mampu melakukan berbagai fungsinya dalam pembangunan, baik sebagai tenaga perencana pembangunan, maupun sebagai pelaksana dan berbagai fungsi lainnya dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan manusia-manusia pembangunan dengan kemampuan sendiri dikemukakan di atas mutlak diperlukan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bangsa Indonesia untuk dapat menjadi penunjang pembangunan serta kemampuannya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya dalam pembangunan tersebut.

Pelaksanaan proses pendidikan seperti yang di maksud di atas juga dilaksanakan secara terus menerus dalam Wilayah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Pelaksanaan kegiatan disektor pendidikan ini antara lain ditandai dengan dibangunnya sejumlah sekolah-sekolah dalam berbagai tingkatan.

Sekolah sebagai sarana pelaksanaan proses pendidikan di Kecamatan Watang Sawitto dapat diketahui berdasarkan data yang dikemukakan dalam tabel berikut ini :

TABEL 6
JUMLAH DAN JENIS SEKOLAH YANG ADA
DI KECAMATAN WATANG SAWITTO TAHUN 1990

No.	Jenis/Tingkatan Sekolah	Banyaknya
1.	Taman Kanak-kanak	15
2.	Sekolah Dasar	78
3.	Sekolah Lanjutan Pertama	10
4.	Sekolah Lanjutan Atas	7
5.	Perguruan Tinggi	1
Jumlah		111

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Pinrang, 1991

Berdasarkan data yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa di Kecamatan Watang Sawitto, daerah Tingkat II Pinrang terdapat sejumlah sekolah mulai dari Tingkat taman kanak-kanak sampai pada tingkat Perguruan Tinggi. Sekolah-sekolah tersebut merupakan wadah peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat, khususnya dalam Wilayah Kecamatan Watang Sawitto dan diharapkan dapat menjadi penunjang bagi kelancaran jalannya pembangunan yang harus ditingkatkan secara terus menerus.

4. A g a m a

Di Indonesia agama adalah salah satu faktor yang sangat penting. Hal ini jelas dapat dilihat dalam sila pertama dari Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha

Esa". Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah negara yang sekaligus merupakan pandangan hidup bagi seluruh bangsa Indonesia haruslah dijadikan sebagai landasan dan titik tolak semua tingkah laku/perbuatan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan Rumah Tangga maupun kehidupan bermasyarakat.

Ini berarti bahwa untuk menjamin terlaksananya kehidupan bangsa sebagaimana yang diharapkan, maka setiap warga negara Indonesia harus dapat mengamalkan setiap sila dalam Pancasila termasuk sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk dapat mengamalkan sila pertama dari Pancasila, tersebut maka setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib untuk memeluk Agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hak untuk menentukan agama ini di jamin dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 dan 2.

Bidang agama di Indonesia telah menjadi salah satu bagian atau sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan agama ini termasuk salah satu aspek pembangunan dibidang mental spriritual. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini bukan hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan material lainnya, akan tetapi juga menginginkan kemajuan di bidang yang bersifat spiritual.

Dengan demikian faktor agama sangat menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dan termasuk pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Watang Sawitto Daerah Tingkat II Pinrang.

Dalam kaitannya dengan keadaan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Watang Sawitto ini, berdasarkan data yang ada maka dari seluruh jumlah penduduk, ada 96,08 % atau sebanyak 74.846 jiwa yang termasuk agama Islam. Selebihnya sebanyak 3,92 % adalah pemeluk agama Kristen Protestan, Katolik serta aliran kepercayaan. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan kemukakan jumlah pemeluk agama/ aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam tabel berikut ini :

TABEL 7
JUMLAH PEMELUK AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN
DI KECAMATAN WATANG SAWITTO
TAHUN 1990

No.	Agama / Kepercayaan	Pemeluk	Prosentase
1.	I s l a m	74.846	96,08
2.	Kristen Protestan	1.678	2,15
3.	Kristen Khatolik	794	1,02
4.	Lain Kepercayaan	583	0,75
J u m l a h		77.901	100,00

Sumber Data : kantor Kecamatan Watang Sawitto, 1991

Untuk sarana peribadahan, maka di Kecamatan Watang Sawitto terdapat 49 buah Mesjid, 1 buah Gereja Protestan, dan 1 buah Gereja Katolik.

5. P e r e k o n o m i a n

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 dicantumkan tentang dasar demokrasi, produksi di kerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Dalam tabel berikut ini dapat kita lihat tentang kelembagaan perekonomian di Kecamatan Watang Sawitto.



TABEL 8

KELEMBAGAAN PEREKONOMIAN

DI KECAMATAN WATANG SAWITTO TAHUN 1990

No.	Kelurahan	Kelembagaan Perekonomian	
		Koperasi	Kel. Tani
1.	Maccorawalie	1	23
2.	Mattiro Deceng	1	22
3.	MacinnaE	1	7
4.	Siparappe	1	13
5.	S a l o	1	13
6.	TemmasarangE	1	17
7.	T i r o a n g	1	28
8.	Sawitto	1	-
J u m l a h		8	123

Sumber Data : Kantor Kecamatan Watang Sawitto, 1991

Dari tabel di atas dengan jelas terlihat bahwa di Kecamatan Watang Sawitto ini kelembagaan perekonomian berjumlah 131 yang masing-masing terdiri dari 8 Koperasi Unit Desa serta 123 Kelompok Tani, diluar Koperasi lainnya seperti Koperasi Sekolah, Koperasi Angkutan serta koperasi Simpan Pinjam dan lain-lain.

Apabila dihubungkan dengan penjelasan terdahulu, mengenai mata pencaharian penduduk yang bleh dikatakan umumnya adalah sebagai petani, maka hal ini sangat

ditunjang oleh selain lahan yang cukup luas dan subur, juga dengan hadirnya kelembagaan perekonomian seperti Koperasi Unit Desa (KUD) yang bergerak di bidang pertanian, serta adanya sejumlah kelompok-kelompok tani di tiap kelurahan.

Dalam tabel berikut ini akan kami ketengahkan produksi pertanian/perkebunan dalam ton kilogram di Kecamatan Watang Sawitto.

TABEL 9

JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
DI KECAMATAN WATANG SAWITTO

No.	Bidang Produksi	Jumlah Ton Kg.	Prosentase
1.	Beras	100.025,46	99,68
2.	Jagung	6,25	0,006
3.	Ketela Pohon	222,71	0,22
4.	Ketela Rambat	86,19	0,085
5.	Kacang Tanah	-	-
6.	Kacang Kedele	-	-
7.	Kacang Hijau	-	-
J U M L A H		100.350,07	100,000

Sumber Data : Kantor Dinas Pertanian Kecamatan

WT. Sawitto, 1991

6. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Sebagaimana kita ketahui bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah lembaga masyarakat yang bertujuan membantu pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan pembangunan di daerah pedesaan.

Namun sebagai lembaga masyarakat yang masih baru dan sedang berkembang, maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Kecamatan Watang Sawitto, khususnya ditiga Kelurahan, masih memerlukan pembenahan diri, dalam arti perlu usaha-usaha pembinaan, baik secara eksteren yaitu oleh pihak lain di luar Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sedangkan secara interen yaitu oleh pihak LKMD itu sendiri. Yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh satu tim yang disebut Tim Pembina LKMD, yang berada di Tingkat Propinsi sampai ke Kabupaten-kabupaten dan Kecamatan.

Usaha-usaha pembinaan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa masih terbatas pada tugas-tugas pokok yang dihadapi serta kembali terus menerus memahami tentang permasalahan baru dan harus dihadapi untuk direalisasikan. Kepala Kelurahan sebagai Pembina Utama dari LKMD, hanya melakukan hanya terbatas pada hal-hal rutin dengan kemampuan yang dimiliki.

Untuk pembinaan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di tiga Kelurahan yang telah dilaksanakan adalah berupa;

- a. Mengadakan usaha-usaha untuk menyempurnakan organisasi, kepengurusan, administrasi dan peningkatan program/kegiatan LKMD, sehingga LKMD benar-benar mampu untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sekaligus sebagai usaha menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam pembangunan.
- b. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan perkembangan LKMD, agar dapat dicegah terjadinya kemacetan atau salah arus. Tugas ini dilakukan oleh Direktorat Pembangunan Desa sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk mengurus pembangunan desa.
- c. Untuk meningkatkan dan merangsang kegiatan LKMD, maka perlu diusahakan untuk memberi bantuan sesuai dengan kebutuhan. Bantuan tersebut terbentuk alat-alat keterampilan atau bahan-bahan yang diperlukan dalam pembangunan.
- d. Mengupayakan gerakan pembangunan desa terpadu secara berkelanjutan lewat bulan bakti LKMD.
- e. Mengadakan latihan kader Pembangunan Desa (KPD), yang diharapkan nantinya dapat membantu LKMD dalam setiap program-program LKMD.

Pembinaan yang baik dan terarah terhadap LKMD diharapkan akan lebih mampu untuk meningkatkan dan menimbulkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

Apabila hal ini dihubungkan dengan kepemimpinan Kepala Kelurahan dan hasil-hasil pembangunan, maka peranan Lurah sebagai pembinan dan penggerak partisipasi masyarakat dapat dikatakan berhasil. Karena masyarakat sungguh-sungguh telah merasakan sentuhan-sentuhan kegiatan pembangunan lewat LKMD sebagai wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto.

Adapun mengenai jumlah dan jenis-jenis proyek fisik serta hasil-hasil pembangunan dan pembiayaannya di tiga Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Watang Sawitto dapat kita lihat pada daftar lampiran dalam skripsi ini.



B A B IV

ANALISA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. Bentuk/Macam Partisipasi

Adapun bentuk/macam partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan Watang Sawitto yaitu meliputi berbagai bentuk swadaya, secara gotong royong yang pada dasarnya dapat digolongkan sebagai :

1. Swadaya dalam bentuk uang
2. Swadaya dalam bentuk/macam tenaga
3. Swadaya dalam bentuk/macam pemikiran
4. Swadaya dalam bentuk/macam barang/bahan

Pada pembahasan yang lalu telah disebutkan tentang cara meningkatkan partisipasi, akan tetapi perlu dipertanyakan kepada atau siapa yang perlu kita ajak berpartisipasi.

Namun demikian berdasarkan pertimbangan ekonomis dan kepraktisan, maka cara untuk menimbulkan partisipasi ialah kita harus mengetahui siapa yang perlu diperhatikan untuk diajak berpartisipasi.

Selama ini partisipasi terutama diperlukan/diperlakukan sebagai masukan dalam proses terjadinya pembangunan.

Partisipasi masyarakat tidak lain adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan baik

dari segi moril maupun materil untuk mencapai tujuan yang didinginkan bersama.

Di Kecamatan Watang Sawitto, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari hasil-hasil kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tiga wilayah Kelurahan yang telah diambil sebagai sampel.

Pada umumnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto diorganisirkan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang ada di setiap kelurahan. Melalui LKMD tingkat-tingkat swadaya masyarakat akan nampak.

Sesuai ruang lingkup pembahasan, maka partisipasi masyarakat yang ingin diketahui, dibatasi khusus pada masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa dan pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang bersifat fisik.

Adapun partisipasi masyarakat yang paling dominan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang ini kita dapat lihat dari hasil angket dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 10
 BENTUK/MACAM PARTISIPASI MASYARAKAT YANG
 MENONJOL DALAM PEMBANGUNAN DI
 WILAYAH KECAMATAN SAWITTO

No.	Bentuk/Macam Partisipasi	Responden	Prosentase (%)
1.	U a n g	8	16
2.	Pikiran	10	20
3.	Tenaga	25	50
4.	Barang / bahan	7	14
! J u m l a h		50	100

Sumber Data : Data hasil penelitian, tahun 1991

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka partisipasi masyarakat yang paling dominan adalah dalam bentuk tenaga yakni 25 Orang atau 50 %, menyusul dalam bentuk pikiran yaitu 10 orang atau 20 % swadaya dalam bentuk uang yakni sebanyak 8 (delapan) orang atau 16 %.

Kemudian berdasarkan dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Wilayah Kecamatan Watang Sawitto mengatakan bahwa bentuk/macam partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan Watang Sawitto ini adalah :

- "- Swadaya gotong royong fisik
- Membikin jalan-jalan desa
- Posyandu
- Penggalian tarsir
- Mendukung peraturan pemerintah
- Melaksanakan peraturan pemerintah secara ikhlas".
(A. Nawir, Kepala Wilayah Kecamatan Watang Sawitto, Wawancara, Pinrang tgl 23-3-1991).

Dari wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang lebih banyak dilaksanakan adalah partisipasi yang berupa gotong royong yang berbentuk fisik.

Untuk lebih jelasnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Watang Sawitto berdasarkan hasil penelitian di tiga desa sebagai daerah sampel penelitian dapat kita lihat sesuai dengan kelompok responden sebagai berikut :



TABEL 11
 BENTUK/MACAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
 PEMBANGUNAN BERDASARKAN ANGKET DAN
 KELOMPOK RESPONDEN

No.	Kelompok Responden	Jumlah Responden	Bentuk/Macam partisipasi	Prosentase (%)
1.	Bangdes	8	Pemikiran	16 %
2.	Kep. Lurah	3	Pemikiran	6 %
3.	L K M D	5	Tenaga	10 %
4.	P. Masyarakat	6	Tenaga	12 %
5.	K U D	5	U a n g	10 %
6.	P K K	5	Tenaga	10 %
7.	Klp. Tani	5	Tenaga	10 %
8.	Pengusaha	4	U a n g	8 %
9.	Buruh Tani	3	Tenaga	6 %
10.	Pedagang	3	U a n g	6 %
11.	Tukang Kayu	3	Bahan	6 %
! J u m l a h		50		100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian, tahun 1991

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa bentuk/macam partisipasi yang paling dominan sesuai dengan jumlah jawaban responden dari 50 angket yang diedarkan, yaitu sumbangan/partisipasi yang berupa tenaga yakni 24 orang responden atau 48 %, menyusul partisipasi dalam bentuk uang sejumlah 12 orang atau 24 %, kemudian partisipasi swadaya yang berbentuk

pemikiran sebanyak 11 orang atau 22 % dan bahan/barang sebanyak 3 orang atau 6 %.

Perlu dikemukakan disini bahwa, sumber dana bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan diwilayah pedesaan umumnya berasal dari dua sumber, yaitu yang bersumber dari subsidi/bantuan pemerintah dan dana yang bersumber dari sumbangan/swadaya masyarakat setempat.

Dana yang bersumber dari pemerintah dimaksudkan untuk memancing partisipasi masyarakat pedesaan. Sedangkan dana yang bersumber dari swadaya masyarakat adalah merupakan salah satu wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan di Kelurahan dan Desa.

Berdasarkan perumusan di atas, maka partisipasi masyarakat di tiga kelurahan sebagai sampel penelitian, yaitu kelurahan Sawitto, Kelurahan Tiroang dan Kelurahan Mattito Deceng dapat dilihat perkembangannya pada tabel berikut, yang menyajikan data-data mengenai perkembangan dan perbandingan antara jumlah subsidi pemerintah dengan dana swadaya masyarakat dalam tiga tahun anggaran yaitu 1987/1988, 1988/1989 dan tahun anggaran 1989/1990.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 12
PERBANDINGAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH
DAN SWADAYA MASYARAKAT DI KELURAHAN SAWITTO

No.	Tahun Anggaran	Dana Yang Dimanfaatkan (Rp)		
		Subsidi	Swadaya	Jumlah
1.	1987 / 1988	1.450.000	370.000	1.820.000
2.	1988 / 1989	1.500.000	9.256.600	10.756.600
3.	1989 / 1990	2.100.000	5.468.500	7.568.500
! J u m l a h !		5.050.000	15.095.100	20.145.100

Sumber Data : Kantor Kelurahan Sawitto, 1991

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa untuk tahun anggaran 1987/1988, dana swadaya masyarakat di Kelurahan Sawitto mencapai jumlah Rp. 370.000.- atau 20,33 % dari keseluruhan dana pembangunan yang dimanfaatkan pada tahun anggaran tersebut. Tahun anggaran berikutnya, yaitu 1988/1989 swadaya masyarakat meningkat Rp. 9.256.600,- atau 86,06 %. Demikian juga untuk tahun anggaran 1989/1990 sebesar Rp. 5.468.500,- atau 72,25 % dari keseluruhan dana pembangunan fisik pada periode tersebut.

Adapun perkembangan dana subsidi pemerintah dan swadaya masyarakat di Kelurahan Tiroang kita dapat lihat pada tabel berikut ini :

TABEL 13
PERBANDINGAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH DAN
SWADAYA MASYARAKAT DI KELURAHAN TIROANG

No.	Thn Anggaran	Dana Yang Dimanfaatkan (Rp)			%
		Subsidi	Swadaya	Jumlah	
1.	1987/1988	1.050.000	950.000	2.000.000	47,5
2.	1988/1989	1.000.000	2.745.000	3.745.000	73,29
3.	1989/1990	1.150.000	3.945.000	5.095.000	77,43
! J u m l a h !		3.200.000	7.640.000	10.840.000	70,48

Sumber Data: Kantor Kelurahan Tiroang, Tahun 1991.

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa untuk tahun anggaran 1987/1988 dana swadaya masyarakat di Kelurahan Tiroang mencapai jumlah Rp. 950.000,- atau 47,5 % dari keseluruhan dana pembangunan yang dimanfaatkan pada tahun anggaran tersebut. Tahun anggaran berikutnya, yaitu tahun anggaran 1988/1989 swadaya masyarakat meningkat Rp. 2.745.000,- atau 73,29 %. Demikian pula untuk tahun anggaran 1989/1990 sebesar 3.945.000,- atau 77,43 % dari keseluruhan dana pembangunan fisik pada periode tersebut.

Adapun mengenai perkembangan dana subsidi pemerintah dan swadaya masyarakat di Kelurahan Mattiro Deceng penulis dapat kemukakan pada tabel berikut ini :

TABEL 14

PERBANDINGAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH DAN
SWADAYA MASYARAKAT DI KELURAHAN MATTIRO DECENG

No.	Tahun Anggaran	Dana Yang Dimanfaatkan (Rp)			
		Subsidi	Swadaya	Jumlah	%
1.	1987/1988	2.000.000	400.000	2.400.000	16,67
2.	1988/1989	1.500.000	9.155.000	10.655.000	85,92
3.	1989/1990	2.250.000	604.000	8.554.000	73,69
! Jumlah		5.750.000	15.859.000	21.609.000	73,39

Sumber Data : Kantor Kelurahan Mattiro Deceng, 1991.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat kita lihat bahwa untuk tahun anggaran 1987/1988, dana swadaya masyarakat di Kelurahan Mattiro Deceng mencapai jumlah Rp. 400.000 atau 16,67 % dari keseluruhan dana pembangunan yang dimanfaatkan pada tahun anggaran tersebut. Tahun anggaran berikutnya yaitu 1988/1989 swadaya masyarakat meningkat Rp. 9.155.000 atau 85,92 %. Demikian pula untuk tahun anggaran 1989/1990 sebesar Rp. 6.304.000 atau 73,69 % dari keseluruhan dana pembangunan fisik pada periode tersebut.

Adapun dana yang berhasil dihimpun dari swadaya masyarakat sebahagian berasal dari sumbangan tetap dari Kepala rumah tangga yang ada di Kelurahan tersebut. Besarnya sumbangan dari setiap kepala rumah tangga

disesuaikan dengan tingkat pendapatan keluarga yang bersangkutan.

Menurut keterangan pengurus LKMD di setiap Kelurahan besarnya sumbangan setiap keluarga ditetapkan setiap tahun dalam rapat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Untuk tidak terlalu memberatkan, maka masyarakat, diberikan keluasaan untuk menyetorkan sumbangannya dengan cara mengangsur, sesuai kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu meskipun besarnya jumlah sumbangan tersebut ditetapkan oleh Kepala Kelurahan berdasarkan input dan rekomendasi dari LKMD, namun pihak masyarakat tidak merasa terlalu diberatkan.

Untuk mengetahui atau mengukur tinggi, sedang atau rendahnya partisipasi masyarakat, penulis berpedoman pada ketentuan (rumus) yang digunakan oleh Dirjen Pembangunan Desa, yang mana ditentukan bahwa untuk mengukur tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan didasarkan atas berapa jumlah swadaya masyarakat yang dinilai dengan rupiah (Rp) dibandingkan dengan bantuan pemerintah, baik lewat APBN, APBD dan yang berasal dari bantuan luar negeri.

Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Sawitto dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp } 15.095.100.-}{\text{Rp } 20.145.100.-} \times 100 \% = 74,93 \%$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Sawitto tinggi yaitu 74,93 % . Ini berarti bahwa bantuan pemerintah sejumlah Rp 5.050.000,- berhasil memancing swadaya masyarakat di Kelurahan Sawitto sebesar : Rp 15.095.100,-

Selanjutnya untuk Kelurahan Tiroang, tingkat partisipasi masyarakat adalah :

$$\frac{\text{Rp } 7.640.000,-}{\text{Rp } 10.840.000,-} \times 100 \% = 70,48 \%$$

Hasil perhitungan tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembiayaan proyek pembangunan fisik di Kelurahan Tiroang Tinggi yaitu 70,48 %. Ini berarti bahwa bantuan atau sub-sidi pemerintah sejumlah Rp 3.200.000,- telah memancing swadaya masyarakat di Kelurahan Tiroang sebesar Rp 7.640.000,- dalam pembiayaan pembangunan.

Sedangkan untuk Kelurahan Mattiro Deceng tingkat partisipasi masyarakat dapat kita hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp } 15.859.000,-}{\text{Rp } 21.609.000,-} \times 100 \% = 73,39 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Mattiro Deceng dalam pembiayaan proyek pembangunan sedang (cukup tinggi) yaitu 73,39 % bila dibandingkan dengan bantuan/subsidi pemerintah. Ini berarti bahwa subsidi pemerintah sebesar Rp 5.750.000,- berhasil memancing swadaya masyarakat di Kelurahan Mattiro Deceng sebesar Rp 15.859.000,- dalam pembiayaan sejumlah pembangunan.

Adapun bentuk/macam partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya di Kelurahan Tiroang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan kerja bakti
2. Melaksanakan program pemerintah
3. Fisik maupun non fisik
4. Kegiatan-kegiatan masyarakat itu sendiri
5. Pemikiran-pemikiran yang berupa saran-saran dari pemuka-pemuka masyarakat apabila ada suatu program perencanaan pembangunan
6. Pemberian bantuan berupa uang dan barang/bahan dari anggota masyarakat itu sendiri (A.Subur Kepala Kelurahan, wawancara, Tiroang tanggal 27-3-1991).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan khususnya Kelurahan Tiroang cukup tinggi, ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya dan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya arti pembangunan, sehingga partisipasi/bantuan masyarakat, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik semakin dirasakan

hasilnya.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan kerja bakti dan kegotong royongan masyarakat di Kelurahan Tiroang ini yang dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela dengan penuh rasa kekeluargaan tersebut adalah merupakan suatu sumbangan dalam pembangunan di daerah ini yang tak ternilai harganya dan hasilnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Seperti perbaikan jalan lorong, membersihkan selokan, penataan pagar, merehabilitasi mesjid dan tempat-tempat ibadah serta penggalian tarsir-tarsir dan lain-lain sebagainya.

B. Tanggapan Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

1. Tanggapan Masyarakat Terhadap partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

- a. Partisipasi masyarakat penting dalam proses pembangunan dewasa ini. Dengan meningkatnya partisipasi akan meningkat kegiatan pembangunan, selaras akan meningkatkan kegiatan usaha pembangunan yang antara lain diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya pembagian beban dan hasil pembangunan yang lebih merata dari kelompok masyarakat. Adapun tanggapan masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan daftar angket yang penulis edarkan yakni

50 lembar, maka jawaban responden dapat kita lihat pada tabel berikut :

TABEL 15
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

No.	Tanggapan	Responden	Prosentase (%)
1.	B a i k	26	52 %
2.	Cukup Baik	13	26 %
3.	R e n d a h	8	16 %
4.	Sangat Rendah	3	6 %
! J u m l a h		50	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian, tahun 1991.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa jawaban responden yang mengatakan baik sebanyak 26 orang (52%), cukup baik sebanyak 13 orang (26%), rendah sebanyak 8 orang (16%) sedangkan sangat rendah sebanyak 3 orang (6%).

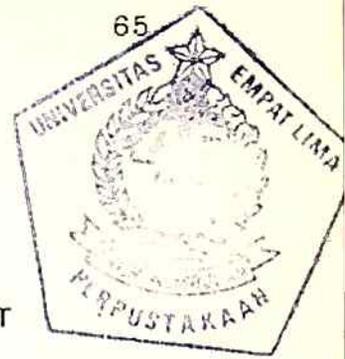
Apabila kita telah melihat pada penjelasan diatas, maka dapatlah diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Wilayah Kecamatan Wang Sawitto cukup baik ini adalah merupakan modal utama yang tidak ternilai harganya di dalam memacu dan menunjukkan pembangunan disegala

bidang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan pembangunan itu sendiri terarah kepada usaha meningkatkan taraf hidup dan memperluas lapangan kerja yang berarti perluasan partisipasi masyarakat.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa tujuan pembangunan Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimaksudkan agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi dalam hal ini pemerintah dan masyarakat selalu bahu membahu dalam melaksanakan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan yang dicapai di Wilayah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang disebabkan karena animo/ kesadaran masyarakatnya di dalam ikut berpartisipasi aktif di dalam pembangunan disegala bidang/ sektor yang sementara digalakkan sekarang ini cukup tinggi. Ini dapat dibuktikan berdasarkan tanggapan responden sesuai dengan daftar angket yang penulis edarkan kepada mereka yaitu sebanyak 50 angket. Untuk lebih jelasnya kita



dapat lihat pada tabel berikut ini :

TABEL 16
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG ANIMO MASYARAKAT
DALAM PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN

No.	Tanggapan	Responden	Prosentase (%)
1.	Tinggi	20	40 %
2.	Cukup tinggi	6	12 %
3.	Sangat tinggi	5	10 %
4.	Sedang	15	30 %
5.	Rendah	4	8 %
! Jumlah		50	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian, tahun 1991

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa animo masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan tinggi yakni sebanyak 20 orang responden atau 40 %, menyusul cukup tinggi sebanyak 6 orang atau 12 %, sangat tinggi sebanyak 5 orang atau 10 %, sedangkan yang berpendapat sedang sebanyak 15 orang atau 30 %, kemudian yang berpendapat rendah sebanyak 4 orang atau 8 %.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa animo masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan di

Wilayah Kecamatan Watang Sawitto cukup tinggi.

- b. Partisipasi berdasarkan keinginan/inisiatif dan tidak ada paksaan akan menghasilkan pembangunan berkualitas menimbulkan rasa ikut memiliki atau rasa ikut tanggungjawab dalam pembangunan. Kalau masyarakat sudah merasa bahwa pembangunan adalah miliknya, akan menjaga, memelihara dan selalu mengawasinya. Kalau terjadi penyimpangan dan ketidak beresan dalam pelaksanaannya maka masyarakat akan menegur, mengeritik atau mengoreksinya, karena merasa pembangunan itu bukan saja milik dan tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi milik dan tanggung jawab masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka sesuai dengan tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah didasarkan atas kesadaran sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

TABEL 17

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEIKUT SERTAAN MASYARAKAT
BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN

No. !	Tanggapan	! Responden	! Prosentase (%)	!
1. !	Kesadaran sendiri	! 32	! 64 %	!
2. !	Anjuran Pemerintah	! 11	! 22 %	!
3. !	Perintah atasan	! 5	! 10 %	!
4. !	P a k s a a n	! 2	! 4 %	!
!	J u m l a h	! 50	! 100 %	!

Sumber Data : Hasil Penelitian, tahun 1991

Dari tabel tersebut di atas, maka dapatlah dimengerti bahwa dari 50 daftar angket yang penulis edarkan, maka yang menjawab bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena didasarkan atas kesadaran sendiri, sebanyak 32 orang (64 %), menyusul anjuran pemerintah sebanyak 11 orang (22%), karena perintah dari atasan sebanyak 5 orang atau (4 %).

Berdasarkan jawaban para responden tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didasarkan atas kesadaran sendiri cukup tinggi di daerah ini. Dengan demikian maka masyarakat di dalam wilayah Kecamatan Watang Sawitto cukup membanggakan dan perlu dipelihara dan dilestari-

kan dari generasi ke generasi, sehingga pembangunan disegala bidang benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Di samping itu melalui pengamatan penulis pada tingkat masyarakat yang paling bawah, terjadi "inersia sosial" yang cenderung menunggu perintah. Kalau terjadi kerusakan bangunan-bangunan (misalnya: jembatan, jalan, sekolah dan lain-lain sebagainya), tidak pernah terlihat spontanitas berdasarkan kesadaran sendiri untuk memperbaiki, melainkan hanya menunggu perintah/instruksi dari pemerintah (Kepala Desa/Lurah).

Begitulah kalau tanpa diikuti sertakan seluruh bagian masyarakat (pranata-pranata masyarakat) dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, yang terjadi pengerahan tenaga berdasarkan instruksi atau mobilisasi, maka rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mengawasi hasil pembangunan tidak ada dan terjadilah inersia sosial.

2. Tanggapan Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Tujuan pembangunan nasional di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mewujudkan

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah mengusahakan agar supaya masyarakat lebih berpartisipasi dalam pembangunan. Meningkatkan partisipasi masyarakat adalah suatu usaha pendayagunaan daya, tenaga dan dana yang terkandung dalam masyarakat.

Dana, tenaga dan daya tersebut di proses dan diarahkan kepada usaha-usaha pembangunan yang menjadi kebutuhan sendiri, baik usaha pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka kegiatan yang ada kaitannya dengan proyek pemerintah maupun inisiatif masyarakat itu sendiri yang berbentuk swadaya masyarakat, oleh sebab itu pada hakekatnya itu pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah berkewajiban membangun prasarana berdasarkan kemampuan anggaran, sedangkan masyarakat berkewajiban membangun yang lainnya berdasarkan kemampuan swadaya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Wilayah Kecamatan Watang Sawitto mengatakan bahwa :

"Bahwa partisipasi masyarakat di Wilayah Kecamatan Watang Sawitto ini telah dianggap cukup baik, karena hasil-hasil partisipasi itu sendiri sudah dirasakan langsung oleh masyarakat dan menyentuh kehidupan masyarakat serta merupakan suatu tolak ukur masyarakat dalam rangka merubah pola pikir masyarakat desa untuk suatu kesejahteraan. (A.Nawir Kepala Kecamatan Watang Sawitto, Wawancara Pinrang, 25-3-1991).

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pemerintah telah menanggapi secara positif pelaksanaan partisipasi aktif masyarakat di Wilayah Kecamatan Watang Sawitto dan dianggap telah cukup berhasil karena hasilnya telah dapat dinikmati langsung oleh masyarakat itu sendiri.

Adapun hasil-hasil yang nampak daripada partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah Wilayah Kecamatan Watang Sawitto berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan Sawitto

A. Tulekkeng adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Mesjid/rehabilitas mesjid/Musallah
- Pembangunan sekolah
- Pengairan dan posyandu
- Pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah
- Perbaikan jalanan besar
- Pembuatan Pam, Pembuatan Poskamling dan sebagainya. (A.Tulekkeng, Kepala Kelurahan Sawitto, Wawancara Pinrang, 28-3-1991).

Dari hasil wawancara di atas, maka cukup meyakinkan tentang realisasi daripada partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan Watang sawitto Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

Berhasilnya pembangunan di segala bidang sangat ditentukan oleh adanya korelasi antara kedua kemampuan yaitu pemerintah dengan masyarakat, usaha-usaha pembangunan yang haluannya telah digariskan dalam GBHN dan realisasinya dalam Pelita.

Potensi yang terkandung dalam masyarakat supaya diarahkan, dikendalikan dan digunakan dalam usaha-usaha pembangunan tersebut serta ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya dalam bentuk pergerakan tenaga, daya dan dana yang dimiliki masyarakat ke dalam usaha-usaha meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan.

Pengalokasian dana, daya dan tenaga yang rasional dan efisien akan menumbuhkan swadaya masyarakat dan akan menentukan berhasilnya pembangunan. Oleh karena itu penggunaan dana, daya dan tenaga kerja manusia perlu diperhitungkan secara rasional dan mantap dengan memperhitungkan benar-benar kemampuan masyarakat, serta diperkirakan berapa persen potensi swadaya masyarakat yang dapat dikerahkan dalam pembangunan.

Sebab kegagalan dalam pengalokasian swadaya masyarakat berarti kegagalan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan. Oleh sebab itu perlu diperhi-

tungkan secara rasional dan memanfaatkannya secara efisien, sehingga akan menimbulkan kegairahan untuk lebih meningkatkan hasil pembangunan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yaitu kemakmuran serta kesejahteraan lahir dan bathin secara adil dan merata berdasarkan Pancasila.

Di dalam menggalakkan pembangunan sekarang ini utamanya di dalam mensukseskan Pelita, yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berkelanjutan dan terus-menerus, maka partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam tugas itu. Oleh karena itu tanpa bantuan dari seluruh rakyat, setiap kebijaksanaan yang telah dirumuskan oleh pemerintah otomatis tidak dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Dalam hal ini kesadaran masyarakat sangat diharapkan untuk turut aktif dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintah terutama yang menyangkut pembangunan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Hambatan-Hambatan Dan Cara Pemecahannya.

a. Kurangnya Tenaga Terampil

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam rangka pembangunan yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan ditingkatkan, diperlukan tenaga yang terampil dalam melaksanakan berbagai fungsi dalam

pembangunan tersebut. Baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan maupun di bidang pengawasan.

Selain daripada itu telah dimaklumi pula bahwa pembangunan yang menginginkan hasil dalam bentuk material dan non material yang dalam hubungan ini terutama untuk peningkatan produksi dalam berbagai sektor, diperlukan adanya faktor-faktor produksi sebagai syarat tercapainya produksi sebagaimana yang diharapkan.

Dengan kurangnya tenaga terampil di dalam pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Watang Sawitto ini adalah merupakan salah satu faktor penghambat di dalam pembangunan tersebut.

b. Rendahnya Tingkat Kesadaran Sebahagian Anggota Masyarakat.

Sebagaimana uraian yang lalu telah diketahui bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh anggota masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan syarat mutlak suksesnya pembangunan. Dengan kata lain bahwa tanpa partisipasi aktif dari masyarakat maka pembangunan tidak mungkin dapat terlaksana atau mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.

Kalau hal ini dikaitkan dengan kenyataan di Wilayah Kecamatan Watang Sawitto, pada umumnya dapat dikatakan; bahwa masih terdapat sebahagian kecil anggota masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang relatif rendah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bandes mengatakan bahwa :

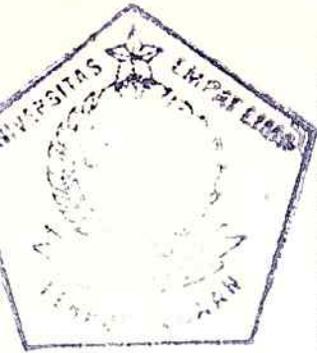
"Apabila dilihat dari pada partisipasi masyarakat di daerah ini cukup baik, namun dibalik dari pada itu masih ada saja diantara sekelompok kecil masyarakat yang masih kurang menyadari tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di segala bidang".

(Drs. Nurdin Manji, Wawancara, Pinrang, 9-3-1991).

Dari wawancara tersebut di atas, maka dapatlah dimengerti bahwa masih ada diantara sekelompok kecil masyarakat yang belum menyadari tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sebagaimana telah diketahui pada pembahasan tersebut di atas bahwa akibat proses pelaksanaan pembangunan memerlukan waktu yang relatif lama dengan demikian, maka masyarakat dituntut untuk bersabar secara suka rela untuk memberikan partisipasi aktifnya di dalam pembangunan bangsa.

Hal ini dengan jelas seperti yang dikemukakan oleh Kepala Kelurahan Mattiro Deceng salah satu responden penulis yang mengatakan bahwa :



"Satu hal yang merupakan hambatan pelaksanaan pembangunan di desa yaitu adanya sejumlah anggota masyarakat yang sekalipun telah dinilai mampu untuk berpartisipasi, namun belum memberikan sumbangannya sepanjang tidak langsung diminta oleh petugas dari LKMD, yang diberi tugas untuk mengumpulkan swadaya masyarakat. Keadaan seperti ini membutuhkan waktu, tenaga yang tidak sedikit untuk terkumpulnya dana pembangunan sesuai yang diharapkan".

(H. Abdul Madjid Kepala Kelurahan Mattiro Deceng, Wawancara Pinrang, 11-3-1991).

Jelaslah bahwa dengan adanya tingkat kesadaran yang relatif rendah merupakan salah satu hambatan.

c. Sikap mental yang apatis.

Kesibukan masyarakat dalam pekerjaannya menyebabkan masyarakat bersikap apatis dalam pelaksanaan proyek pembangunan daerah yaitu masyarakat petani sibuk dengan pekerjaannya di sawah disamping kesibukan-kesibukan diluar pekerjaan pokoknya. Masyarakat pengusaha sibuk dengan usahanya, tidak ada waktu terluang untuk melayani persoalan pembangunan daerah kecuali urusan usahanya, dan masyarakat nelayan sibuk dengan pekerjaannya menangkap ikan di laut dan hanya sedikit sekali waktu yang terluang untuk istirahat di dataran. Masyarakat pegawai sibuk dengan pekerjaannya di Kantor, baik dalam bentuk pekerjaan dinas atau pekerjaan extra seperti menghadiri pertemuan organisasi sosial dan masyarakat, kunjungan keluarga, berolah raga dan sebagainya.

Kesibukan-kesibukan masyarakat dalam pekerjaannya menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pembangunan daerah, dalam arti sumbangan pikiran, sumbangan material dan hanya tersedia dalam masyarakat yang sukar untuk dimanfaatkan pembangunan daerah yang dilaksanakan di desanya.

d. Sikap Mental Yang tidak Loyal

Sikap mental yang tidak loyal masyarakat, dikarenakan keluhan-keluhannya tidak terpenuhi, dari hasil ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena, tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan kurang terampilnya Kepala Desa/Kelurahan untuk berkonsultasi, memberikan alasan-alasan yang tepat untuk itu. Keterampilan Kepala Desa/Kelurahan untuk berkonsultasi dengan masyarakat perlu dikembangkan.

e. Budaya/Adat Istiadat

Dari beberapa hambatan yang telah dikemukakan di atas, maka masih ada hambatan lain yaitu budaya/adat kebiasaan dimana di Desa-desa masih memegang teguh adat istiadat yang dianutnya yaitu adanya dua status sosial yaitu bangsawan dan masyarakat biasa, yang mana pada masyarakat bangsawan kurang melibatkan tenaganya pada pelaksanaan pembangunan karena menganggap dirinya lebih

tinggi status sosialnya daripada masyarakat biasa.

2. Pemecahannya

Adapun pemecahan mengenai hambatan-hambatan tersebut di atas penulis dapat perinci sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pinrang dalam penyusunan anggaran pembangunan dapat menyediakan dana yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan usaha peningkatan keterampilan penduduk didesa, seperti: melalui penataran, kursus-kursus dan semacamnya dalam berbagai bidang, sehingga dengan demikian tenaga-tenaga terampil tidak perlu menjadi hambatan pembangunan, baik dari segi pembiayaan, waktu dan sebagainya.
- b. Upaya peningkatan kesadaran sebagian anggota masyarakat. Para Kepala Desa, pengurus LKMD dan Tokoh masyarakat lainnya agar secara terus-menerus berusaha melalui berbagai upaya seperti ceramah, penyuluhan baik pada tempat-tempat ibadah, maupun melalui sarana/wadah lainnya, sehingga dengan demikian masyarakat pada akhirnya dapat semakin sadar dan berpartisipasi secara aktif dan maksimal yang merupakan syarat suksesnya pembangunan.

c. Sikap mental yang apatis diusahakan menjadi sikap mental yang sosial yaitu dengan jalan mengadakan pembangian kerja yang teratur, kesibukan-kesibukan dalam pekerjaan apabila disertai dengan pembangian yang teratus dapat memberikan waktu untuk melayani persoalan pelaksanaan proyek pembangunan daerah di desanya.

d. Sikap mental yang loyal.

Sikap mental yang loyal masyarakat, sedapat mungkin keluhan-keluhan dapat dipenuhi sehingga ada rasa kepuasan, dan keterampilan Kepala Desa untuk berkonsultasi dapat dikembangkan dan juga dapat memberikan argumentasi yang tepat.

e. Sedapat mungkin bagi golongan bangsawan yang kurang melibatkan tenaganya pada pelaksanaan pembangunan, agar lebih banyak menyumbangkan uang/materi supaya ada keseimbangan dan rasa kebersamaan.

B A B V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dari bab ke bab, maka tibalah pada bab yang terakhir yakni kesimpulan. Adapun kesimpulan sehubungan dengan pembahasan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa cukup baik/tinggi ini disebabkan :
 - Tingkat kesadaran anggota masyarakat cukup tinggi dan rasa kepeduliannya terhadap pembangunan.
 - Adanya waktu luang bagi Kepala Lurah/Desa didalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
2. Bentuk/macam partisipasi dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan Watang Sawitto menunjukkan bahwa partisipasi berupa tenaga termasuk kategori yang paling menonjol, partisipasi berupa pemikiran termasuk kategori sedang dan partisipasi berupa bahan/barang dan uang termasuk kategori yang kurang.
3. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan Watang Sawitto Daerah Tingkat II Pinrang, maka hasil-hasilnya sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Adapun hasil-hasil pembangunan di Desa/Kelurahan yang dicapai dengan partisipasi masyarakat adalah:

- Pembangunan mesjid/rehabilitas mesjid, musallah
- Pembangunan sekolah dan posyandu
- Pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah dan perbaikan-perbaikan jalanan besar dan kecil
- Pembuatan pam, pembuatan poskamling, penggalian tirsir dan sebagainya.

4. Bahwa berhasilnya pembangunan disegala bidang sangat ditentukan oleh adanya korelasi antara kedua kemampuan yaitu masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan untuk merangsang partisipasi masyarakat, sedangkan masyarakat berpartisipasi untuk merangsang bantuan dari pemerintah.

B. Saran - Saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka pemerintah perlu memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat di dalam merencanakan sesuatu pembangunan dipedesaan/Kelurahan, karena dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam

pembangunan, maka masyarakat merasa memiliki pembangunan tersebut.

2. Untuk lebih menggairahkan masyarakat di dalam keterlibatannya dalam berpartisipasi di dalam pembangunan, maka diharapkan pemerintah dapat lebih tanggap untuk mengetahui keinginan-keinginan masyarakat serta dapat memberikan pengertian-pengertian tentang betapa pentingnya keikutsertaannya dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata diseluruh Indonesia.
3. Diharapkan pula agar supaya pemerintah melibatkan atau mengikutsertakan secara langsung (rapat) dan memberikan tanggapan dan saran-saran dalam ruang lingkup yang lebih luas, meminta informasi tentang segala sesuatu dalam usaha mengambil keputusan dalam perencanaan dan menjelaskan tentang maksud dan tujuan perencanaan yang dikeluarkan.
4. Disarankan pula agar masyarakat dapat memberikan dukungan/partisipasi aktifnya terhadap segala perencanaan/program pemerintah yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU - BUKU

- Amrullah Zainal Wali. 1975. Brosur Pembangunan Desa,
Direktorat Pembangunan Desa Sulawesi Selatan.
- Budiman Arif. 1971, Partisipasi Dalam Pembangunan
Memerlukan Pimpinan Yang Bagaimana.
- Faisal Sanafiah Drs, 1981, Menggalang Masyarakat
Bangun Diri Masyarakat Desa, Surabaya :
CV Usaha Nasional.
- Fred W. Riggs. 1986, Administrasi Pembangunan, Cet. I,
Jakarta : CV. Rajawali.
- Koentjaraningrat. 1981, Kebudayaan Mentalitas dan Pem-
angunan, Jakarta : PT. Gramedia.
- Manannawawi. Drs. 1975, Program Pembangunan Masyarakat
Pedesaan, Jakarta.
- Nitisemito. Alex Drs. 1982, Manajemen Personalia,
Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekarno K. 1968, Dasar-dasar Manajemen, Jakarta :
Niswar.
- Siagian SP. 1980, Administrasi Pembangunan, Jakarta :
PT. Gunung Agung.
- . 1984, Pengelolaan Pembangunan Nasional.
Jakarta : LP3ES.
- Tjokroamidjojo Bintoro, 1978, Pengantar Administrasi
Pembangunan, Jakarta : LP3ES
- . 1979, Teori dan Strategi Pembangunan
Nasional. Jakarta : LP3ES.
- . 1977, Perencanaan Pembangunan, Jakarta :
PT. Pembangunan.

B. BUKU METODOLOGI

- Baso A. Gani. 1975, Himpunan Kuliah Sosiologi Pembangunan. Penerbit : Fakultas Sospol UNHAS.
- Mas'ud Mochtar Dr. 1983, Kualitas Manusia Pembangunan, Harian Kompas.
- Saggaf Said M. Drs. 1975, Beberapa Pengertian dan Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Masyarakat Desa, Diktat Santiaji, Propinsi Sulawesi Selatan.
- Sawe Djainuddin Drs. 1980, Diktat Pembangunan Desa dan Masyarakat Desa.
- Tjokroamidjojo Bintoro. 1973, Administrasi Nasional, Ceramah Fakultas Sospol Universitas Gajah Mada.

C. LAIN - LAIN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Tap MPR RI No. II/MPR/1983, Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Jakarta : 1984.
- Undang-Undang RI No. 5 tahun 1979, Tentang Pemerintahan Desa dan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Semarang : Aneka Ilmu.

TABEL III

JUMLAH DAN JENIS PROYEK FISIK KELURAHAN SEMITTO

No	Tahun	Jenis Proyek	Banyaknya	Sumber Biaya (%)			Jumlah
				Swadaya	Bant. Penth.	Jumlah	
Prasarana Sosial							
1	87/88	Pengadaan Tong Sampah	30 Buah.	-	350.000	350.000	
2	88/89	Pemb. Saluran/Bot	1 Km.	750.000	-	750.000	
3	88/89	Penggalan Salokan	2,5 Km	750.000	-	750.000	
4	88/89	Rehabilitasi Masjid	1 Buah	6.406.600	-	6.406.600	
5	89/90	Pintu Kantor Kelurahan	-	-	-	-	
5	89/90	Pemb. Pager, Teras, dan	-	2.325.000	1.900.000	4.225.000	
5	89/90	Pentu Kantor Kelurahan	20 Buah	50.000	200.000	250.000	
7	89/90	Pengadaan Tiro Sampah	2 Unit	1.811.300	-	1.811.300	
8	89/90	Pemb. Pos. Siskamling	200 m	259.750	-	259.750	
9	89/90	Pengalangan Saluran Air	3 Buah	205.200	-	205.200	
10	89/90	Pemb. Jalan Keluaraga	4 Buah	75.500	-	75.500	
10	89/90	Perbaikan Sumur Pompa	-	-	-	-	
Prasarana Perhubungan							
11	87/88	Pemb. Duker	5 Buah	370.000	1.100.000	1.470.000	
12	88/89	Pemb. Duker	6 Buah	300.000	1.500.000	1.800.000	
13	88/89	Pemb. Borong-gorong	5 Buah	525.000	-	525.000	
14	88/89	Penirbunan Lorong	400 meter	250.000	-	250.000	
15	88/89	Pembuatan Lorong Baru	70 meter	175.000	-	175.000	
16	89/90	Penirbunan Lorong	805 meter	386.750	-	386.750	
Prasarana Produksi							
17	89/90	Penguluhan Koperasi	85 Orang	40.000	-	40.000	
18	89/90	Pembinaan Kejar Usaha Ekonomi Desa & Irdost Kecil	26 Orang	45.000	-	45.000	
Jumlah				15.095.100	5.050.000	20.145.100	

Sumber : Kantor Kelurahan Semitto, 1990



JUMLAH DAN JENIS FISIK KELUARAHAN TIRONG

Lampiran 2

No.	Tahun	Jenis Proyek	Banyaknya	Sumber Biaya (Rp)		Jumlah
				Swadaya	Subsidi	
		Prasarana Sosial				
1	87/88	Peng. Sampah	20 buah	500.000	250.000	750.000
2	88/89	Pembuatan Got	1/2 Km	375.000	-	375.000
3	88/89	Reh. Masjid	1 buah	570.000	-	570.000
4	88/89	Pengg. Got	2,5 Km	700.000	-	700.000
5	89/90	Pemb. Pagur Kantor Lurah	-	2.000.000	1.000.000	3.000.000
6	89/90	Peng. Torg Sampah	25. buah	75.000	150.000	225.000
7	89/90	Pem. Pos. Kam.	1. Unit	1.000.000	-	1.000.000
8	89/90	Gali Saluran air	500 meter	350.000	-	350.000
9	89/90	Jamban Kaluarga	3 buah	225.000	-	225.000
10	89/90	Perbaikan sumur	3 buah	75.000	-	75.000
		Prasarana Per- hubungan.				
11	87/88	Pemb. Duker	5 buah	450.000	800.000	1.250.000
12	88/89	Pemb. Duker	5 buah	300.000	1.000.000	1.300.000
13	88/89	Pemb. Gorong	5 buah	500.000	-	500.000
14	88/89	Perb. Gorong	300 meter	200.000	-	200.000
15	88/89	Pemb. Lorong	50 meter	100.000	-	100.000
16	88/90	Penimbunan Lorong	60 meter	150.000	-	150.000
		Prasarana Prod.				
17	89/90	Penguluh Koperasi	65 orang	50.000	-	50.000
18	89/90	Pembinaan Kejar Usaha ek. Dasa & Industri Kecil	25 orang	20.000	-	20.000
		Jumlah		7.640.000	3.200.000	10.840.000

Sumber Data : Kantor Kelurahan Tirong, tahun 1991

JUMLAH DAN JENIS PROYEK FISIK KELURAHAN
MRTIRO DECENG.

No.	Tahun	Jenis Proyek	Banyaknya	Sumber Biaya (Rp)		Jumlah
				Swadaya	Subsidi	
Prasarana Sosial						
1	87/88	Peng. Saripah	1 Km	-	800.000	800.000
2	88/89	Reg. Masjid	1 bush	6.500.000	-	6.500.000
3	88/89	Pemb. Got	1,5 Km	800.000	-	800.000
4	88/89	Tong Saripah	-	400.000	-	400.000
5	89/90	Pemb. Teras Pintu Kantor Lurah	-	3.200.000	1.950.000	5.150.000
6	89/90	Ada Tong Saripah	27 bush	100.000	300.000	400.000
7	89/90	Pem. Pos. Kar.	2. Uhit	1.950.000	-	1.950.000
8	89/90	Pengg. Tersir	800 meter	600.000	-	600.000
9	89/90	Jamban Jamban Perbaikan sumur	4 bush	279.000	-	279.000
10	89/90	Prasarana Per- hubungan.	4 bush	75.000	-	75.000
Prasarana Prod.						
11	87/88	Pemb. Duiker	5 bush	400.000	1.200.000	1.600.000
12	88/89	Pemb. Duiker	5 bush	350.000	1.500.000	1.850.000
13	88/89	Pemb. Gorong	5 bush	575.000	-	575.000
14	88/89	Pemb. Gorong	500 meter	350.000	-	350.000
15	88/89	Pemb. Lorong	60 meter	180.000	-	180.000
16	88/90	Penimbunan Lorong	-	150.000	-	150.000
Prasarana Prod.						
17	89/90	Penyuluh Koperasi	50 orang	50.000	-	50.000
18	89/90	Pembinaan Kejar Usaha ak. Desa & Industri Kecil	30 orang	50.000	-	50.000
Jumlah				15.859.000	5.750.000	21.609.000

Sumber Data : Kantor Lurah Maltiro Deceng, tahun 1991